

# Hak Penyandang Disabilitas Belum Terpenuhi

## ● 40% Tak Tersentuh Pendidikan

**YOGYAKARTA** - Hak-hak penyandang disabilitas di DIY ternyata belum terpenuhi dengan baik. Hal ini tercermin dalam beberapa bidang seperti kesehatan, pendidikan, aksesibilitas, hukum, rehabilitasi dan pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan politik dan publik serta perolehan jaminan sosial terkait disabilitas.

"Terlebih lagi dalam bidang kebijakan. Kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mendukung penguatan pemenuhan hak-hak azasi bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas masih dilihat sebagai masalah bahkan ada juga yang memandangnya lebih dari itu," ungkap aktivis disabilitas juga Koordinator Ilai, Winarta saat menjadi narasumber dalam seminar tentang kebijakan mengenai disabilitas di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kemarin.

Kegiatan atas kerja sama Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas (FPHPD), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Ciqal dan Ilai. Seminar dihadiri para penyandang disabilitas serta pemerhati dan aktivis LSM.

Winarta menjelaskan, pada bidang aksesibilitas, jalan, bangunan dan transportasi yang ada belum ramah terhadap penyan-

dang disabilitas dan belum meratanya akses informasi untuk penyandang disabilitas.

Pada bidang medis, belum semua penyandang disabilitas mendapatkan jaminan kesehatan gratis, belum semua layanan kesehatan yang dibutuhkan tersedia seperti fisioterapi, obat untuk penyandang gangguan jiwa dan home care. Selain itu pula, masih adanya diskriminasi dalam ketentuan kepesertaan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa.

### Kesenjangan

Mengenai persamaan di muka hukum, para penyandang disabilitas juga mengalami kesenjangan dibandingkan orang pada umumnya. Pada permasalahan ini, banyak kasus menimpa penyandang disabilitas tapi mereka tidak bisa bersaksi di muka hukum. Padahal saat itu posisi mereka sebagai korban.

"Misalkan mereka menjadi korban kekerasan seksual, mereka tidak bisa bersaksi di muka

umum dengan berbagai alasan," tandasnya.

Koordinator FPHPD, Dr Arni Surwanti Msi mengatakan situasi yang dihadapi penyandang disabilitas memprihatinkan. Di DIY ada lebih 40% penyandang disabilitas belum dapat menikmati pendidikan, dan baru sekitar 20% yang bekerja. Situasi ini ternyata menurutnya tidak lepas dari pandangan kuat di masa lalu bahwa penyandang disabilitas adalah persoalan medis semata atau orang sakit dan pendekatan yang diperlukan adalah belas kasihan.

"Akibatnya, program pemerintah cenderung hanya berupa kegiatan pemberian bantuan-bantuan kebutuhan hidup sementara kegiatan untuk memberdayakan mereka sangat minim dan terbatas pilihannya. Penyandang disabilitas juga sulit mengakses hak yang sama dengan warga negara lainnya dan terpinggirkan perannya di masyarakat karena kurangnya dukungan kebijakan pemerintah," jelasnya.

Karena itulah, keduanya berharap ke depannya para penyandang disabilitas bisa bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat mereka sebagai manusia. Namun untuk mewujudkan hal tersebut juga perlu diatur dalam peraturan daerah yang segala kebijakannya harus berpihak pada mereka. (D19-52)